



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**



TAHUN ANGGARAN 2025



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DENGAN**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR : 07 /NK/BR/VIII/2024

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024

NOMOR : 07 /DPRD/VIII/2024

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si.**
Jabatan : Bupati Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 82 Barru
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barru.

2. a. Nama : **LUKMAN T.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Barru

b. Nama : **Drs. H. KAMIL.R, M.Si.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Barru

c. Nama : **A.F.K.MAJID, ST.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barru
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Barru

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, Untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA. 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah TA 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Barru, 9 Agustus 2024

BUPATI BARRU

selaku,
PIHAK PERTAMA


Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU

selaku,
PIHAK KEDUA


LUKMAN T.
KETUA

Drs. H. KAMIL R. M. Si.
WAKIL KETUA


A.F.K. MAJID, ST.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan Penyusunan PPAS	2
	1.3 Dasar Hukum	3
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH	5
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	6
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	55
	4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	55
	4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang, Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	112
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2025 memuat program prioritas dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2025 tersusun maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan rencana alokasi anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;

2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2025 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 berlandaskan kepada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021);

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.07/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 3);

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN
4.	PENDAPATAN DAERAH	961.384.597.366,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	128.988.091.324,00
4.1.01.	Pajak Daerah	39.588.466.324,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	6.033.313.272,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.418.879.113,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	72.947.432.615,00
4.2.	Pendapatan Transfer	832.396.506.042,00
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	782.257.134.154,00
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	50.139.371.888,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	961.384.597.366,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.887.376.715,00
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.887.376.715,00
	PEMBIAYAAN	18.872.489.854,99
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	970.271.974.081,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2024

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Barru pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Barru (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Pusat dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Program prioritas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas Belanja Pemerintah Kabupaten Barru yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2025.

Adapun sinergitas program dimaksud sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	SDM Berkualitas	Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun Retrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penetapan Pelayanan Primer dan Penutasan Stunting		
		Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif		
		Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi dan Lulusan STEAM berkualitas		
		Pendidikan dan Pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual system		
		Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa		
2	Infrastruktur Berkualitas	Penetapan Hub Laut dan Hub Udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi		
		Penguatan Infrastruktur Digital	Program Aplikasi Informatika	DINAS KOMINFO SP
		Pengembangan Infrastruktur Transisi Energi		
		Percepatan Infrastruktur IKN		
		Penetapan Reformasi Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
		Pengembangan Skema Graduasi Bansos		
		Peningkatan Lingkungan Inklusif terhadap Anak, Lansia, Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Penduduk Rentan lainnya		
		Peningkatan Ketrampilan Bekerja dan Berwirausaha Sepanjang Hayat	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
		Peningkatan Partisipasi Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan lainnya sebagai Angkatan Kerja		
		Percepatan Investasi dan Ekspor Non Migas Produk Olahan		
		Peningkatan Produksi Industri Pengolahan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Dukungan Regulasi Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif		
		Penyediaan Infrastruktur untuk Mendukung Transisi Energi	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUTR-PERKIM
Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2023				

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
1	PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	Meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	53,86	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	48%	150.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	74 Persen	90.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperatif yang aktif	100	33.576.000	DISKUMDAG
						Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase peningkatan kesehatan koperasi simpan pinjam	98	11.180.500	DISKUMDAG
						Program promosi penanaman modal	Persentase calon investor yang berinvestasi	0,8016	5.110.000	DINAS PMPTSP
						Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun sesuai standart peraturan per UU an	100%	29.593.000	DINAS PMPTSP

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	580 M	590.202.000	DINAS PMPTSP
						Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	957.751.500,00	Dikominfo-SP
						Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,6	92.606.000	Dinas Perikanan
						Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Peningkatan produksi Perikanan Budidaya	8% (6849)	781.224.675	Dinas Perikanan
						Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	1463,83	147.073.200	Dinas Perikanan
						Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah pad pariwisata	2,00%	105.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
						Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisataawan	6,49%	250.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
						Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase peningkatan pelaku ekfraf yang memiliki haki	100%	25.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekraf	14,00%	270.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun	8.48%	1.734.000.542	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
							Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	3.95%		
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1.52 Persen	4.507.375.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0,27 Persen	591.702.150	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Kerugian Akibat Bencana Pertanian	15 Persen	95.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin Usaha Sesuai Standart	100 Persen	25.000.000	Dinas Pertanian dan KP
						Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	20 Persen	664.077.624	Dinas Pertanian dan KP

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah kerja Kab/Kota	95,00%	933.715.900	DISKUMDAG
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan indikator pembangunan Industri dalam RIPIK	20	129.597.000	DISKUMDAG
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil Pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	100	29.353.000	DISKUMDAG
						Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	19,30%	2.880.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
							Serta peran pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,33%	1.012.097.501	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
2	PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	Poin	71,02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM)	100	72.762.219.260	DINAS PENDIDIKAN

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
							Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (SPM)	100		
							Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	100		
						Program pembinaan perpustakaan	Persentase peningkatan Pemustaka pada Perpustakaan Daerah dan Taman Baca	88%	132.167.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Kenaikan Raihan Prestasi Pada Event Olahraga Provinsi Dan Nasional	100%	2.030.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
		Meningkatnya Usia harapan hidup masyarakat	Indeks kesehatan	Poin	77,51	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100	82.131.645.391	DINAS KESEHATAN
							Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100		

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
							Angka Status Gizi Masyarakat	92,55%		
							Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	86%		
							Indeks Keluarga Sehat	0,07		
							Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan (SPM)	100%		
						Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan	92%	57.221.600	DINAS KESEHATAN
						Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Persentase Penduduk yang menerapkan PHBS	82%	404.432.000	DINAS KESEHATAN

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program perlindungan perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,52%	218.302.500	DINAS KESEHATAN
						Program pemenuhan hak anak (pha)	Nilai Capaian evaluasi Kabupaten Layak anak	900	65.500.000	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Kualitas daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita	Juta rupiah	11,86	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Varian harga antar waktu barang kebutuhan pokok	≥10	56.000.000	DISKUMDAG
						Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	92,19%	209.133.300	DISKUMDAG
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, norma-norma, hukum dan ideologi kebangsaan pada masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,001	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum perda dan perkara (SPM)	100	1.066.998.982	SATPOLPP
		Terwujudnya Penguatan Seni Budaya dan kearifan Lokal	Persentase objek kemajuan budaya yang terpelihara	%	14,29	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	100	55.355.700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
3	PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Angka kemiskinan	%	6,28	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	97,00%	468.946.208	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan	0.40%	323.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,98	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi	100	42.475.693	Dinas Tenaga Kerja
						Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	65,00%	203.614.885	Dinas Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program hubungan industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	62,16%	32.472.975	Dinas Tenaga Kerja
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	20	569.688.917	Dinas Tenaga Kerja
4	OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik	Nilai SAKIP	Poin	75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Maturitas SPIP	4	6.460.731.991	DPUTR-PERKIM
			Indeks pelayanan publik	Poin	4,25		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20	100.000.000	DPUTR-PERKIM
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kominfo	3,00	4.085.194.251	Dikominfo-SP
							Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL		Dikominfo-SP

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP Disnaker	4	2.449.598.778	Dinas Tenaga Kerja
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20		
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	12.750.300	DPUTR-PERKIM
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	nilai maturitas SPIP DLH	3 Poin	2.549.281.376	Dinas Lingkungan Hidup
							Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 JPL	98.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	3	4.192.410.460	Dinas Perhubungan
							Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl	140.000.000	Dinas Perhubungan
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	3	3.273.293.222	DISKUMDAG

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
							Rata-rata lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	110.000.000	DISKUMDAG
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP DPMTSP	4 Point	2.994.224.270	DINAS PMPTSP
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	130.000.000	DINAS PMPTSP
						Program pelayanan penanaman modal	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	99,46%	554.421.536	DINAS PMPTSP
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan	3	2.965.420.286	Dinas Perikanan
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	NILAI MATURITAS SPIP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4 Level	5.814.881.443	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
							RATA-RATA LAMA PEGAWAI MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	20 JPL	90.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pertanian	3 Poin	14.039.573.404	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
							Rata - rata Lama Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20 JPL	70.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	3 Level	5.270.619.315	Kantor Kecamatan Barru
							Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	13.794.000	
						Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	55.790.000	Kantor Kecamatan Barru
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	100%	1.558.237.271	Kantor Kecamatan Barru
						Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	35.855.000	Kantor Kecamatan Barru

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	1.715.000	Kantor Kecamatan Barru
						Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	6.815.000	Kantor Kecamatan Barru
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3	2.850.769.986	Kecamatan Balusu
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL		
						Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	48.000.000	Kecamatan Balusu
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	100%	330.942.500	Kecamatan Balusu
						Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	25 orang	46.500.000	Kecamatan Balusu

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	5 Laporan	3.000.000	Kecamatan Balusu
						Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	33.000.000	Kecamatan Balusu
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP Tanete Riaja	3.00	3.548.054.536	Kantor Kecamatan Tanete Riaja
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL		
						Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	28.200.000	Kantor Kecamatan Tanete Riaja
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembangunan yang melibatkan Masyarakat/Kelompok/Lembaga	100%	424.079.320	Kantor Kecamatan Tanete Riaja
						Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	30.621.000	Kantor Kecamatan Tanete Riaja

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan desa/kel yang dibina dan diawasi	100%	4.100.000	Kantor Kecamatan Tanete Riaja
						Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	49.490.000	Kantor Kecamatan Tanete Riaja
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Nilai Maturitas SPIP kecamatan	3 level	4.755.336.869	Kantor Kecamatan Mallusetasi
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL		
						Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Dokumen SOP Pelayanan yang disusun dan Implementasikan	100%	19.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat / kelompok / lembaga	100%	1.461.793.730	Kantor Kecamatan Mallusetasi
						Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	32.250.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	56.250.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	3.00 Point	3.686.405.010	Kantor Kecamatan Tanete Rilau
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	61.961.000	Kantor Kecamatan Tanete Rilau
						Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang tersusun dan diimplementasikan	100%	36.445.000	Kantor Kecamatan Tanete Rilau
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan Masyarakat/Kelompok/ Lembaga	100%	883.928.157	Kantor Kecamatan Tanete Rilau
						Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100% (7 Laporan)	87.936.138	Kantor Kecamatan Tanete Rilau
						Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	47.647.845	Kantor Kecamatan Tanete Rilau
						Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pemerintahan Desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	11.939.000	Kantor Kecamatan Tanete Rilau

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	3 point	3.529.515.382	Kantor Kec. Soppeng Riaja
							Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL		
						Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	65.015.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	100%	660.771.046	Kantor Kec. Soppeng Riaja
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	44.150.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
						Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	46.000.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
						Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	7.500.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3	2.549.743.782	Kecamatan Pujananting
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl		
						Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	13.835.000	Kecamatan Pujananting
						Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	100%	365.886.961	Kecamatan Pujananting
						Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	55.355.400	Kecamatan Pujananting
						Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	1.800.000	Kecamatan Pujananting
						Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	24.716.800	Kecamatan Pujananting

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	2.365.735.300	DINAS KOMINFO SP
						Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	457.494.500	DINAS KOMINFO SP
						Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Informasi Daerah yang wajib diamankan dengan Persandian	100%	63.000.000	DINAS KOMINFO SP
						Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100	1.070.500.600	DPUTR-PERKIM
						Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	100	2.750.300	DPUTR-PERKIM
5	PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	a Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur	Poin	3,884	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	81,96	50.584.478.707	DPUTR-PERKIM

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	39	1.075.435.846	DPUTR-PERKIM
						Program pengelolaan sumber daya air(sda)	persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik	57,15	10.000.000.000	DPUTR-PERKIM
							Persentase luas kawasan permukaan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	8,2	13.135.966.396	DPUTR-PERKIM
						Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	99,43 layak dan 70,32	2.309.667.592	DPUTR-PERKIM
						Program penataan bangunan gedung	Persentase Kepatuhan IMB	100	5.320.000.000	DPUTR-PERKIM
						Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	202	760.000.000	DPUTR-PERKIM

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program pengembangan perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	1.507.775.000	DPUTR-PERKIM
							Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni (SPM)	100	400.000.000	DPUTR-PERKIM
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	2,88	3.875.000.000	DPUTR-PERKIM
						Program peningkatan prasarana , sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase peningkatan kawasan perumahan yang memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	61	348.025.450	DPUTR-PERKIM
						Program kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	78	1.550.275.000	DPUTR-PERKIM
						Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	3.835.289.164	DPUTR-PERKIM

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Ilaj)	Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100,00%	3.694.306.704	Dinas Perhubungan
							Persentase layanan angkutan darat	100,00%	707.698.000	Dinas Perhubungan
						Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut melalui dermaga	2 %	2.190.209.469	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,6	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	215.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	23,00%	314.558.664	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	342.714.881	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	86,85 %	122.713.602	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	25.321.360	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) , Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	100%	11.761.954	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	88,00%	74.150.815	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan per Uuan	100,00%	12.706.092	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang tertangani	82,00%	1.724.729.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatny a Ketahanan terhadap bencana	Persentase penurunan korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,004					

Tabel 3.3
Prioritas, sasaran, arah kebijakan pembangunan daerah dan Program Prioritas Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2025	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2025	Pagu indikatif	Perangkat daerah
1	PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS	Meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah	Pengembangan industrialisasi yang berbasis investasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	48%	150.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	74 Persen	90.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperatif yang aktif	100	33.576.000	DISKUMDAG
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase peningkatan kesehatan koperasi simpan pinjam	98	11.180.500	DISKUMDAG
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	11	17.772.000	DISKUMDAG
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase calon investor yang berinvestasi	0,8016	5.110.000	DINAS PMPTSP
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun sesuai standart peraturan per UU an	100%	29.593.000	DINAS PMPTSP

				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	580 M	590.202.000	DINAS PMPTSP
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,6	92.606.000	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan produksi Perikanan Budidaya	8% (6849)	781.224.675	Dinas Perikanan
				Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	1463,83	147.073.200	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah pad pariwisata	2,00%	105.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisataawan	6,49%	250.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan pelaku ekraf yang memiliki haki	100%	25.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekraf	14,00%	270.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Tahunan	8.48%	1.734.000.542	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	3.95%		
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1.52 Persen	4.507.375.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0,27 Persen	591.702.150	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Kerugian Akibat Bencana Pertanian	15 Persen	95.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin Usaha Sesuai Standart	100 Persen	25.000.000	Dinas Pertanian dan KP Dinas Pertanian dan KP
					Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	20 Persen	664.077.624	
				Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah kerja Kab/Kota	95,00%	933.715.900	DISKUMDAG
				Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan indikator pembangunan Industri dalam RIPIK	20	129.597.000	DISKUMDAG
				Program pengendalian izin usaha industri	Persentase jumlah hasil Pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	100	29.353.000	DISKUMDAG
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	19,30%	2.880.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
					Serta Peran Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1,33%		DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
2	PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM)	100	72.762.219.260	DINAS PENDIDIKAN

					Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (SPM)	100		
					Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	100		
				Program pembinaan perpustakaan	Persentase peningkatan Pemustaka pada Perpustakaan Daerah dan Taman Baca	88%	132.167.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Meningkatnya Usia harapan hidup masyarakat	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Kenaikan Raihan Prestasi Pada Event Olahraga Provinsi Dan Nasional	100%	2.030.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100	82.131.645.391	DINAS KESEHATAN
					Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100		
					Angka Status Gizi Masyarakat	92,55%		
					Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	86%		
					Indeks Keluarga Sehat	0,07		

					Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan (SPM)	100%		
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan	92%	57.221.600	DINAS KESEHATAN
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Persentase Penduduk yang menerapkan PHBS	82%	404.432.000	DINAS KESEHATAN
				Program perlindungan perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,52%	218.302.500	DINAS KESEHATAN
				Program pemenuhan hak anak (pha)	Nilai Capaian evaluasi Kabupaten Layak anak	900	65.500.000	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Kualitas daya beli masyarakat	Peningkatan pengawasan terhadap harga bahan pangan;	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien Varian harga antar waktu barang kebutuhan pokok	≥10	1.958.120.499	DISKUMDAG
				Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	92,19%	65.773.500	DISKUMDAG
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, norma-norma, hukum dan ideologi kebangsaan pada masyarakat	Peningkatan Peran Lembaga dan Organisasi Keagamaan dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase Lembaga Kepramukaan Yang Aktif	100%	400.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
				Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum perda dan perkara (SPM)	100	1.066.998.982	SATPOLPP

				Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	100	55.355.700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi.	100	35.838.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Program penguatan edilogi pancasila dan karakter bangsa	Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara.	100%	1.022.572.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	12.622.572.450	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase penurunan konflik sosial di lingkungan masyarakat	50%	307.265.458	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	perlindungan dan jaminan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	97,00%	428.946.208	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan	0.40%	80.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100	263.369.500	DINAS SOSIAL

					Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100		
					Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100		
					Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tna sosial di luar panti (SPM)	100		
					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100		
				Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapat jaminan sosial	100	780.980.000	DINAS SOSIAL
			Peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi	100	11.000.000	Dinas Tenaga Kerja
				Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	65,00%	48.000.000	Dinas Tenaga Kerja

				Program hubungan industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	62,16%	38.404.000	Dinas Tenaga Kerja
				Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	20	188.502.006	Dinas Tenaga Kerja
4	OPTIMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Nilai Maturitas SPIP	4	6.970.939.059	DPUTR-PERKIM
					Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20	51.727.500	DPUTR-PERKIM
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kominfo	3,00	3.310.512.887	Dikominfo-SP
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP Disnaker	4	1.845.500.000	Dinas Tenaga Kerja
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20	20.000.000	
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	nilai maturitas SPIP DLH	3 Poin	3.465.293.943	Dinas Lingkungan Hidup
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	3	4.783.695.894	Dinas Perhubungan
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	3	3.784.510.082	DISKUMDAG

				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP DPMPTSP	4 Point	2.759.613.799	DINAS PMPTSP
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	130.000.000	DINAS PMPTSP
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	99,46%	105.255.000	DINAS PMPTSP
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan	3	3.488.104.371	Dinas Perikanan
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai maturitas spip dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga	4 Level	4.032.073.139	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
					Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 JPL	10.000.000	DINAS PARIWISATA PEMUDA OR
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pertanian	3 Poin	11.794.759.984	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Rata - rata Lama Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20 JPL	40.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	3 Level	5.471.135.965	Kantor Kecamatan Barru
					Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	6.897.000	

				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	57.484.500	Kantor Kecamatan Barru
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	100%	1.470.619.146	Kantor Kecamatan Barru
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	30.245.000	Kantor Kecamatan Barru
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	1.055.000	Kantor Kecamatan Barru
				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	4.565.000	Kantor Kecamatan Barru
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3	2.307.510.352	Kecamatan Balusu
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	54.714.000	Kecamatan Balusu
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	48.000.000	Kecamatan Balusu
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	100%	330.945.500	Kecamatan Balusu
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	25 orang	46.500.000	Kecamatan Balusu

				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	5 Laporan	3.000.000	Kecamatan Balusu
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	33.000.000	Kecamatan Balusu
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP Tanete Riaja	3.00	3.524.570.328	Kantor Kecamatan Tanete Riaja
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	4.598.000	Kantor Kecamatan Tanete Riaja
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	21.355.000	Kantor Kecamatan Tanete Riaja
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembangunan yang melibatkan Masyarakat/Kelompok/Lembaga	100%	292.162.070	Kantor Kecamatan Tanete Riaja
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	42.150.800,00	Kantor Kecamatan Tanete Riaja
				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pemerintahan desa/kel yang dibina dan diawasi	100%	3.528.000	Kantor Kecamatan Tanete Riaja
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	32.950.000	Kantor Kecamatan Tanete Riaja
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Nilai Maturitas SPIP kecamatan	3 level	4.472.779.807	Kantor Kecamatan Mallusetasi

				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Dokumen SOP Pelayanan yang disusun dan Implementasikan	100%	8.850.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat / kelompok / lembaga	100%	749.239.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	28.825.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	47.826.400	Kantor Kecamatan Mallusetasi
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	3.00 Point	3.772.231.537	Kantor Kecamatan Tanete Rilau
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	38.095.473	Kantor Kecamatan Tanete Rilau
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang tersusun dan diimplementasikan	100%	36.445.000	Kantor Kecamatan Tanete Rilau
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan Masyarakat/Kelompok/ Lembaga	100%	883.928.157	Kantor Kecamatan Tanete Rilau
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100% (7 Laporan)	87.936.138	Kantor Kecamatan Tanete Rilau
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	47.647.845	Kantor Kecamatan Tanete Rilau

				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pemerintahan Desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	11.939.000	Kantor Kecamatan Tanete Rilau
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	3 point	3.166.772.384	Kantor Kec. Soppeng Riaja
					Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	13.794.000	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	37.644.500	Kantor Kec. Soppeng Riaja
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	100%	507.612.628	Kantor Kec. Soppeng Riaja
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	36.000.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	40.722.800	Kantor Kec. Soppeng Riaja
				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	3.065.000 2.221.899.273	Kantor Kec. Soppeng Riaja Kecamatan Pujananting
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3		
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl	12.627.000	

				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	11.550.000	Kecamatan Pujananting
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	100%	248.508.738	Kecamatan Pujananting
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	36.388.888	Kecamatan Pujananting
				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	1.710.000	Kecamatan Pujananting
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	26.850.000 1.370.938.600	Kecamatan Pujananting DINAS KOMINFO SP
				Program Pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%		
				Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	77.403.500	DINAS KOMINFO SP
				Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Informasi Daerah yang wajib diamankan dengan Persandian	100%	34.764.500	DINAS KOMINFO SP
				Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	100	25.000.000	DPUTR-PERKIM

				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	245.730.749.589	DINAS PENDIDIKAN
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl	35.344.500	
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	76.685.445.236	DINAS KESEHATAN
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl		
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	2.470.987.121	BPBD
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl	3.525.000	
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	5.661.053.319	SATPOL PP
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl	5.000.000	DINAS SOSIAL
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	3.446.448.900	
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl	20.000.000	

				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	3.930.032.770	DISDUKCAPIL
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl		
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	8.076.450	DPMDPPKBPPPA
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl		
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	3.965.599.776	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl		
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	36.803.514.184	SEKRETARIAT DAERAH
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl		
				program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	16.725.875.935	SEKRETARIAT DPRD
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl		
				program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	3.429.851.446	BAPPELITBANGDA
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl		
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	6.694.275.090	BKAD

					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl	26.400.000	
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	4.207.902.208	BAPENDA
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl		
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	3.785.659.828	BKPSDM
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl	65.000.000	
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	4.265.075.243	INSPEKTORAT
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl	40.274.800	
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	Nilai Maturitas SPIP	3	2.344.208.076	BAKESBANGPOL
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 jpl	4.860.000	
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Tingkat Kematangan Organisasi	Level 2	261.449.300	BAGIAN ORGANISASI
				Program perekonomian dan pembangunan	Tingkat Kematang UKPBJ	level 3	212.441.500	BAGIAN BARANG DAN JASA
				Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Ketersediaan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai Peraturan Per UU dan Ditetapkan tepat waktu	100%	494.034.000	BAPPELITBANGDA

					Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program RPJMD	100%		
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	343.981.000	BAPPELITBANGDA
				Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Per Undang-undangan	100%	103.425.857.361	BKAD
					Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	100%		
					Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100%		
				Program pengelolaan pendapatan daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	2,64%	2.932.739.823	BAPENDA
				Program pengelolaan barang milik daerah Program kepegawaian daerah	Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan	100%	1.138.801.018 626.252.750	BKAD BKPSDM
				Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP pertahun	80%	1.233.050.850	BKPSDM
				Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	90	1.152.595.000	INSPEKTORAT

5	PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Meningkatkan kualitas konstruksi jalan drainase;	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	81,96	27.168.578.783	DPUTR-PERKIM
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	39	1.971.182.000,00	DPUTR-PERKIM
				Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik	57,15	9.346.926.677,00	DPUTR-PERKIM
					Persentase luas kawasan permukaan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	8,2		DPUTR-PERKIM
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	99,43 layak dan 70,32	1.773.938.273,00	DPUTR-PERKIM
				Program penataan bangunan gedung	Persentase Kepatuhan IMB	100	10.442.511.619,00	DPUTR-PERKIM
				Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	202	597.149.600,00	DPUTR-PERKIM
				Program pengembangan perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	1.304.422.480,00	DPUTR-PERKIM

					Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM)	100	32.000.000,00	DPUTR-PERKIM
				Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	2,88	249.716.770,00	DPUTR-PERKIM
				Program peningkatan prasarana , sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase peningkatan kawasan perumahan yang memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	61	3.789.531.225,00	DPUTR-PERKIM
				Program kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	78	892.004.529,00	DPUTR-PERKIM
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	1.850.642.300,00	DPUTR-PERKIM
			Meningkatkan ketersediaan moda transportasi	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Ilaj)	Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100,00%	1.202.394.150	Dinas Perhubungan
					Persentase layanan angkutan darat	100,00%		Dinas Perhubungan
				Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Pemulihan pencemaran / kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	23,00%	68.412.350	Dinas Lingkungan Hidup
				Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	140.616.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	86,85 %	32.872.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	27.156.500	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	88,00%	43.711.300	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan per Uuan	100,00%	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang tertangani	82,00%	3.844.839.000	Dinas Lingkungan Hidup

				Program penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)		497.600.000	BPBD
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)			
		Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)		1.444.070.000	BPBD
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)			
					Waktu tanggap (response time)			
				Program Penanganan Bencana	Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)		249.206.500	DINAS SOSIAL

Sumber : Sumber : Data olah Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2025, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2025. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2025. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteratif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2025 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diuraikan pada tabel 4.1

TABEL 4.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
1						2	3	4
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2180 Orang/bulan	244.652.047.063	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14 Orang	35.344.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	91.079.550	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	123.664.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	3 Unit	60.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	332.884.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	153.166.476	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19 Laporan	146.093.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52 Unit	75.070.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	55.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	5.900.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	261.297.854	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Ruang	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	48 Unit	8.020.913.445	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 Unit	193.540.623	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	5 Paket	160.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	10 Paket	131.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	600 Peserta Didik	217.260.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	79 Orang	400.040.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	419 Orang	428.861.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120 Satuan Pendidikan	156.415.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	199 Satuan Pendidikan	2.584.925.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	226 Dokumen	72.285.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3 Ruang	510.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	199 Satuan Pendidikan	342.659.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	30 Ruang	8.318.507.874	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	16708 Peserta Didik	16.605.520.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	25 Paket	1.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	567.022.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Ruang	195.973.392	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 Unit	200.625.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14 Unit	1.774.086.915	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8 Ruang	4.280.439.327	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	10 Paket	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	10 Paket	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6882 Peserta Didik	8.263.520.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	600 Peserta Didik	251.282.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23 Orang	136.090.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	244 Orang	222.658.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	39 Satuan Pendidikan	89.310.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	39 Satuan Pendidikan	2.535.838.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	39 Dokumen	23.530.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3407 Satuan Pendidikan	301.190.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 Ruang	407.756.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4 Paket	113.850.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	10 Unit	241.120.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	6859 Peserta Didik	3.841.735.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	645 Orang	5.213.655.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	200 Orang	128.521.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	254 Satuan Pendidikan	117.280.950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3 Ruang	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1050 Peserta Didik	3.503.252.680	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Objek	151.980.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	6 Laporan	664.667.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	90 Sertifikat	109.627.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1 Objek	168.756.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional			
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	300 Orang	347.093.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN Cagar Budaya			
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	27 Objek	270.408.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					DINAS KESEHATAN			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	991.800	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	726 Orang/bulan	74.248.329.275	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	26.416.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Paket	10.182.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	143.301.400	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24 Paket	10.096.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	113.315.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Paket	33.250.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.380.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	462.473.500	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	5 Unit	32.800.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	78.509.100	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	567.875.474	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	146.400.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48 Unit	332.800.000	Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66 Unit	30.625.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	434.700.687	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Unit Kerja	19.278.825.742	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	18 Unit	5.864.663.117	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	5 Unit	5.504.076.530	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	735.740.340	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4 Unit	2.054.837.347	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200 Unit	75.477.507	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	117 Unit	38.918.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2 Paket	2.877.578.492	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.180 orang	739.146.300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2671 Orang	98.874.300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2544 Orang	237.656.920	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12376 Orang	89.866.272	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2880 Orang	536.697.500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	34676 Orang	396.049.755	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16022 Orang	247.374.100	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	48358 Orang	527.110.233	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3069 Orang	31.624.760	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	475 Orang	38.528.050	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3630 Orang	349.235.975	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3760 Orang	135.686.300	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2 Dokumen	219.883.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	12 Dokumen	5.600.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	5.075.294.600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7 Dokumen	21.369.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9 Dokumen	668.055.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	106.300.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	11.510.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	697.050.500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2384 Orang	30.255.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1.638.502.960	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	45.488.187.741	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	5 Dokumen	80.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	3.291.830.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Dokumen	1.148.324.692	Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	14.400.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	22.370.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	13 Unit	1.039.830.500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0 Orang	249.800.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0 Orang	9.450.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11 Dokumen	81.601.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	11 Dokumen	1.488.701.600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13 Dokumen	358.248.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	5.940.000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	7.630.000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	9.010.000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	13.558.000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	38 Orang	3.146.600	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	3.090.000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	20.787.000	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 Dokumen	21.561.000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 Dokumen	141.257.000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	110 Unit	181.532.000	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	404.432.000	Dinas Kesehatan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
					RUMAHSAKITUMUMDAERAHLAPATARA			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	500.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	300.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	45.678.802.844	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	28.983.106	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2 Unit	292.774.545	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 Unit	2.254.098.459	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	6 Unit	949.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	2.044.856.230	Dinas Kesehatan
					DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	5.039.679.259	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	57.227.500	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	69.105.500	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2.540.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	106.209.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	33.250.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11 Paket	61.600.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24 Paket	9.700.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.190.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	482 Laporan	296.012.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	208.400.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	34 Unit	51.900.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	270.192.810	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	19.375.500	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	110.250.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	11.840.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	249.600.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	61.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Unit	79.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	6 Unit	306.837.500	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	50.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	0.22 KM	241.268.343	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	02	2.01	0099	Peningkatan Kanal Banjir	0.410 KM	1.273.999.990	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	02	2.01	0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0.028 KM	219.463.992	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	0,202 KM	1.080.700.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0.125 KM	1.228.524.780	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1 Dokumen	350.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	0.650 KM	372.764.462	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	02	2.02	0009	Peningkatan Bendung Irigasi	1 Bendung	161.544.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.374 KM	3.983.949.372	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	0.215 KM	384.711.738	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Dokumen	233.998.500	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	1.539.939.773	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	177.917.500	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 Unit	69.815.300	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	120 Rumah Tangga	1.602.909.500	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaa	1.971.182.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13 Bangunan Gedung	8.887.647.119	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Bangunan Gedung	50.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.306.405.700	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100 Dokumen	198.458.800	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	6,134 KM	18.403.578.909	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	10 Jembatan	250.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	4 Jembatan	7.415.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200 KM	100.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	95,4 KM	999.999.874	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	280.388.800	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	316.760.800	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	12.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1 Dokumen	20.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	30 Orang	23.322.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	30 Orang	26.688.400	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	02	2.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30 Orang	15.366.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	30 Unit Rumah	904.613.410	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	5 Unit Rumah	302.432.670	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	15 Unit Rumah	244.141.270	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	2,2 Ha	647.863.259	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Unit Rumah	249.716.770	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	27 Lokasi	3.759.531.225	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	20.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	3 Laporan	10.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	Dinas PUTR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN & KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.146.830.225	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 Orang	3.525.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	2.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	20.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	3.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	45.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	11.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.200.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	44.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	1 Unit	30.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.731.896	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	57.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	47.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 Unit	35.200.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	10 Unit	3.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	6.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	3.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	125 Orang	45.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	5 Unit	5.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	30 Orang	21.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 Kawasan	15.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	25 Orang	310.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.250.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 laporan	5.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	2 Kawasan	95.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	355 Orang	19.525.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	150 Orang	37.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	12.325.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	7.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	5.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1 Dokumen	25.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN & KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	5.161.617.107	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	60.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	5.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	5.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	2.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	3.685.894	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	2.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	36.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	3.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137 Laporan	129.067.500	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	2 Unit	5.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Laporan	1.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	75.082.818	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	9.600.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	145.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3 Unit	5.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	2.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	380 Dokumen	32.015.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 laporan	942.005.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	18 Laporan	4.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7 Laporan	28.978.982	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	6 Laporan	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7 Laporan	35.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN & PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150 Laporan	1.431.520.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	60 Orang	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	2.550.000	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
					DINAS SOSIAL			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.544.286.900	Dinas Sosial
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	20.000.000	Dinas Sosial

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13 Paket	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Dinas Sosial
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Dinas Sosial
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	Dinas Sosial
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	3 Unit	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	Dinas Sosial
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	10 Orang	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	40 Orang	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	40 Orang	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	2 Orang	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3 Orang	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	3 Orang	Dinas Sosial

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	72000 Orang	25.980.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1100 Keluarga	25.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1100 Keluarga	760.000.000	Dinas Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	100 Orang	40.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	300 Orang	60.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	20 Orang	15.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	10 Orang	149.206.500	Dinas Sosial
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	183 Makam	70.000.000	Dinas Sosial
					DINAS TENAGA KERJA			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	500.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.412.600.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
2	07	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	500.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 Orang	20.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	10.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	500.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	500.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	500.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338 Laporan	200.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	500.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	20.000.000	Dinas Tenaga Kerja

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	6 Unit	10.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	10.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	20.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1 Unit	500.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	20.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	12 Orang	10.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	120 Orang	163.002.006	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2 Lembaga	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	151 Unit	1.007.500.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1 Lembaga	3.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1 Perizinan	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	6 Perusahaan	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	10 Orang	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	15 Orang	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	5 Orang	2.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	500 Orang	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	2 Lembaga	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	10 Orang	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	7 Orang	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	8 Orang	7.500.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	10 Orang	3.500.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	10 Orang	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	12 Perusahaan	6.500.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	12 Perusahaan	4.904.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	4 Laporan	7.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Perkara	10.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Perkara	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	12 Orang	5.000.000	Dinas Tenaga Kerja
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	5 Unit	8.076.450	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Dokumen	30.241.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	7 Organisasi	25.994.500	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.120.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	198.866.600	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	10.120.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	65.500.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	36 Orang	17.163.500	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	228.555.900	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3.114.211.952	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	2.475.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	1.732.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	51.739.200	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	15.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	25.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	33.492.500	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	18.968.640	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	40.800.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit	37.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	1.500.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2.511.400	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	40 Dokumen	12.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	40 Dokumen	19.172.500	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40 Dokumen	825.369.372	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40 Dokumen	56.713.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40 Orang	22.214.500	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	40 Laporan	19.043.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40 Dokumen	9.240.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Laporan	10.240.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	40 Dokumen	17.091.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	80 Orang	9.240.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	55 Dokumen	30.784.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Lembaga	20.661.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	48.326.500	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40 Laporan	24.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	55 Dokumen	161.750.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	48.600.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	77.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	12 Laporan	347.200.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	105.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	105.150.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	298 Orang	165.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan	691.920.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.03		Pengendalian & Pendistribusian Kebutuhan Alat & Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14 Laporan	11.700.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	517 Orang	189.502.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	8 Unit	216.039.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	14.900.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan& Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 Organisasi	25.415.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2 Dokumen	3.750.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	24 Unit	720.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	55 Kampung	285.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	25 Unit	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2 laporan	426.000.000	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2 laporan	500.300.550	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa, PPKB dan P3A
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.991.153.943	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	48.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	3.900.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.254.200	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284 Laporan	234.700.300	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	50.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32 Unit	61.065.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Unit	8.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	8.020.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	38.412.350	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18,52 Ha	140.616.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3			
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	4 Laporan	10.911.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	3 Dokumen	21.961.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	06	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10 Dokumen	7.156.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 Badan Usaha	20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2 Dokumen	43.711.300	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	4 Pengaduan	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2 Kelompok	45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	43 Unit	799.914.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1 Dokumen	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan & pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	25180,6 Ton	2.964.925.000	Dinas Lingkungan Hidup
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.192.837.270	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	302.938.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.776.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139 Laporan	89.417.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	135.610.950	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.220.500	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	244.800.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 Unit	47.695.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	5.775.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	4.280.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4 Dokumen	19.109.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	101.263.500	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen	54.970.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	14.698.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4 Dokumen	3.703.850	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Layanan	64.139.500	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	3.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2 Dokumen	5.356.100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	13 Dokumen	13.225.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7 Laporan	34.835.500	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	14.193.500	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
					DINAS PERHUBUNGAN			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	4.244.485.452	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	486.500	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	67.073.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 Paket	1.800.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	412.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan	171.090.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1700 Laporan	12.090.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	94.060.642	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	126.053.800	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	8.775.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2 Unit	57.369.500	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	900 Unit	470.776.750	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	5 Unit	10.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	415 Unit	162.156.600	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	2.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Unit	15.955.800	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	3.600.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	535.200.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	36 Laporan	2.205.000	Dinas Perhubungan
					DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	865.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	425.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	390.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	390.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.339.214.387	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1.839.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	1.500.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	23.477.500	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.227.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142 Laporan	115.614.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	112.491.500	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	21.995.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	4.000.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	1 Laporan	156.065.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	58 Komunitas	157.437.500	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1 Laporan	8.066.500	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	80 Permohonan	470.571.500	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	38 Media	165.611.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	15.000.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	3 Laporan	303.338.600	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	1.052.600.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	5 Orang	17.688.500	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	100 Persentase	53.750.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	18 Dokumen	2.790.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	18 Dokumen	3.175.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	32.649.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.414.884.602	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	1.791.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	103.455.900	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	90.337.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	1.500.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	117.170.500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	30.271.080	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit	19.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	3.600.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	2.500.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	60 Unit Usaha	33.576.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Unit Usaha	11.180.500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	17.772.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	29.009.700	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit	904.706.200	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	6.750.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.951.370.499	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	748 Unit	60.980.500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	240 Orang	4.793.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	129.597.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	1 Dokumen	29.353.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	26.012.500	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.409.085.357	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	347.600	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Paket	2.409.648	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	26.963.500	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	3.528.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	14.585.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153 Laporan	220.337.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	600.500	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	2.065.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	255.600.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	31.300.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	8.828.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	20.765.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.110.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan. Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2700 Pelaku Usaha	45.255.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	10 Pelaku Usaha	8.359.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	550 Kegiatan Usaha	51.641.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9 Kegiatan Usaha.	88.530.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	253 Pelaku Usaha	324.612.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	16 Kegiatan Usaha	177.060.000	Dinas Penanaman Modal, PTSP
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.091.274.467	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116 Laporan	51.758.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	34.736.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	29.121.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Laporan	84.990.309	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	639.600.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	27.220.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	6.900.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	238 Perpustakaan	51.414.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	18 Orang	30.753.300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	7 Lokus	30.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	1 Berkas	3.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	15905 Berkas	7.700.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	12.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	10.800.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	2300 Berkas	2.200.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1 Arsip	700.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			
2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	1 Arsip	7.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1 Arsip	7.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			
2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	1 Arsip	1.400.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					DINAS PERIKANAN			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.201.806.571	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	4.000.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	4.495.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan	104.586.500	Dinas Perikanan
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
3	25	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	25.797.300	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	230 Laporan	41.162.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	11.682.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	7.425.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	40.800.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	44.375.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1.975.000	Dinas Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dokumen	10.155.000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	10 Unit	50.051.000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	20 Orang	30.000.000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	6 Kelompok	2.400.000	Dinas Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	6 Kelompok	9.585.000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	6 Kelompok	2.600.000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Rekomendasi	3.360.000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.760.000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.475.000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75 Unit	642.764.675	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Unit	2.160.000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	30 Unit	101.695.000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1 Dokumen	9.825.000	Dinas Perikanan
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	7.263.000	Dinas Perikanan
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha	8.674.200	Dinas Perikanan
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	46,15 Ton	38.278.500	Dinas Perikanan
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Pelaku Usaha	92.857.500	Dinas Perikanan
					DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	40 Orang	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	1928 Orang	2.700.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2 Organisasi	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
2	19	03	2.01		Pembinaan & Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	50 Orang	200.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	3 Orang	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	100 Orang	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	1.500.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	1 Dokumen	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Organisasi	400.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	3.509.182.946	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	2.000.193	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 Paket	2.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22 Unit	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan Laporan	95.500.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan	95.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	13.390.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	5.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Lokasi	75.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8 Unit	25.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	20 Usaha	5.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	200.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	40 Produk	25.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	40.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 Orang	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	20 Orang	90.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	90.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1 Unit	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 unit	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10 Laporan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	7 Unit	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	7 Unit	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Ton	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Ton	10.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	2 Ton	10.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	7 Laporan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	8 Dokumen	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	178.946.208	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	7 Laporan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	7 Laporan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	20.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	114.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	11.000.707.122	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	40.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	7.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	35.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	2.363.235	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	205.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	52.120.650	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	32.218.977	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	6.250.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	60.600.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit	41.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	10.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	10.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	280.908.057	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	648.123.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	60.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Varietas Unggul Baru (VUB)	306.463.485	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	70.780.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Ton	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Ton	10.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2512 Ekor	352.726.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	35.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	2 Unit	240.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5 Unit	1.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	2 Unit	240.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	2 Unit	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	7 Unit	2.617.375.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2 Unit	150.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	1 Unit	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan & Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dlm daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	83.062.150	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa	7 laporan	45.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	4 Laporan	15.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	2 Laporan	45.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	343.075.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	15.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	7 Kasus	45.565.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	35.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Ha	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4 Laporan	10.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	1 Laporan	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	2 Laporan	10.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	7 Unit	285.085.800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	7 Unit	120.891.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	158.100.124	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	7 Unit	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	2.180.500	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	1.233.000	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	65.542.200	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	10.194.500	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.374.000	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	9.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	2.710.000	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Dokumen	9.971.400	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	125 Laporan	221.996.400	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	169 Laporan	83.121.500	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	39.159.500	Sekretariat Daerah (Bag. Kesejahteraan Rakyat)
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.312.500	Sekretariat Daerah (Bag. Kesejahteraan Rakyat)
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	11.968.780.450	Sekretariat Daerah (Bag. Kesejahteraan Rakyat)
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	649.921.500	Sekretariat Daerah (Bag. Kesejahteraan Rakyat)

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	3.870.500	Sekretariat Daerah (Bag. Kesejahteraan Rakyat)
					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	6.992.000	Sekretariat Daerah (Bag. Peng. Barang dan Jasa)
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	67.739.200	Sekretariat Daerah (Bag. Peng. Barang dan Jasa)
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.103.500	Sekretariat Daerah (Bag. Peng. Barang dan Jasa)
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	2.065.000	Sekretariat Daerah (Bag. Peng. Barang dan Jasa)
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%		
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 Dokumen	134.053.000	Sekretariat Daerah (Bag. Peng. Barang dan Jasa)
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Dokumen	61.350.000	Sekretariat Daerah (Bag. Peng. Barang dan Jasa)
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 Orang	17.038.500	Sekretariat Daerah (Bag. Peng. Barang dan Jasa)
					BAGIAN PEMERINTAHAN			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	68.553.000	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.964.000	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	2.930.000	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan			
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	12.945.000	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	116.145.500	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	155.430.400	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	68.568.500	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
					BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69 Laporan	93.382.600	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian & SDA)
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.716.500	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian & SDA)
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	8.500.000	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian & SDA)
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	3.250.000	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian & SDA)
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	21.975.700	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian & SDA)
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	24.464.500	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian & SDA)
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	48.965.000	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian & SDA)
4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	14.004.500	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian & SDA)
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	5 Dokumen	47.117.900	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian & SDA)
					BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	18.765.500	Sekretariat Daerah (Bag. Protokol & Komunikasi)
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.308.000	Sekretariat Daerah (Bag. Protokol & Komunikasi)
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	2.710.000	Sekretariat Daerah (Bag. Protokol & Komunikasi)
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	143 Laporan	187.857.000	Sekretariat Daerah (Bag. Protokol & Komunikasi)
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	129 Laporan	116.504.000	Sekretariat Daerah (Bag. Protokol & Komunikasi)

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	119 Laporan	83.993.500	Sekretariat Daerah (Bag. Protokol & Komunikasi)
					BAGIAN HUKUM			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	14.444.500	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	25.961.500	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan Laporan	4.144.500	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	2.950.000	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	3 Dokumen	230.676.500	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	129.949.500	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1 Dokumen	115.184.000	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)
					BAGIAN UMUM			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	10.593.372.390	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	74.429.900	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	50.172.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Paket	146.345.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.146.393.500	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	789 Laporan	954.667.500	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	926.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Unit	113.070.900	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	26.400.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	190.738.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	6.062.896.194	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	523.400.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1.230.840.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	607.040.300	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27 Unit	413.469.500	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29 Unit	19.985.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 Unit	370.605.025	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	398.430.040	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	645.643.705	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9 Paket	172.300.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	227.400.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	3.136.590.500	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Paket	469.995.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Paket	350.000.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Paket	64.996.000	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
					BAGIAN ORGANISASI			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97 Laporan	31.697.500	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	20.725.000	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.174.400	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	1.300.000	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi			
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	88.252.600	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	91.405.800	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	64.067.000	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	46.827.000	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
					SEKRETARIAT DPRD			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02				SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.034.868.699	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	15.653.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	90.175.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	66.065.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	103.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Dokumen	74.880.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	53.693.200	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420 Laporan	365.657.500	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	200.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	5 Unit	173.605.340	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	145.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Laporan	200.730.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38 Laporan	559.500.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	518.362.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	21.840.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32 Unit	22.266.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	735.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	9.664.026.696	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	5 Paket	259.900.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	25 Orang	127.525.000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD			
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	273.428.500	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3 Paket	1.020.200.000	Sekretariat DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	1.175.497.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	4 Dokumen	767.244.500	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	50 Dokumen	583.172.500	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	378.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	252.000.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	17 Dokumen	281.800.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	441 Laporan	42.300.000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	3.366.637.500	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	593 Dokumen	6.596.168.500	Sekretariat DPRD
					BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01				PERENCANAAN			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.157.685.854	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	3.000.000	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5.033.000	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	11.171.400	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	3.786.000	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	6.940.000	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1.680.000	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	159.886.000	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	105 Unit	120.000.000	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	63.170.400	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	52.206.192	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	58.800.000	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	26.475.000	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 Unit	13.500.000	BAPELITBANGDA
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	7.000.000	BAPELITBANGDA
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara	25.350.000	BAPELITBANGDA
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	38.005.000	BAPELITBANGDA

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	57.735.000	BAPELITBANGDA
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	345.016.500	BAPELITBANGDA
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	44 Orang	9.695.000	BAPELITBANGDA
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	8 Laporan	19.895.000	BAPELITBANGDA
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	16 Laporan	57.859.000	BAPELITBANGDA
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36 Dokumen	52.375.000	BAPELITBANGDA
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	12 Laporan	75.516.000	BAPELITBANGDA
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dok. Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD & RKPD)	12 Dokumen	39.269.000	BAPELITBANGDA
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	82.712.300	BAPELITBANGDA
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	32.007.800	BAPELITBANGDA
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	37.865.000	BAPELITBANGDA
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	35.176.500	BAPELITBANGDA
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 Laporan	35.921.500	BAPELITBANGDA
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	65.094.000	BAPELITBANGDA
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	69.907.000	BAPELITBANGDA
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21 Dokumen	14.270.000	BAPELITBANGDA
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	17.925.000	BAPELITBANGDA
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	59.295.000	BAPELITBANGDA
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	52.825.000	BAPELITBANGDA
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	71.365.000	BAPELITBANGDA
					BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02				KEUANGAN			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.167.614.308	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1.380.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1.033.400	Badan Pendapatan Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388 Laporan	383.200.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	162.960.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	150.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	85.414.500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	140.400.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	53.400.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32 Unit	12.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	50.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	10 Dokumen	679.542.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7 Laporan	55.716.500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Unit	498.600.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2 Laporan	104.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	27 Laporan	77.596.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	50.991.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	918.379.823	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	360.630.500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	186.784.000	Badan Pendapatan Daerah
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02				KEUANGAN			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.820.500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	5.416.429.590	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	26.400.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	50.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	5.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	55.125.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	10.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	460.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	50.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	50.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	210.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	36.075.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	24.925.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit	22.500.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	20.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	32.894.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	26.075.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	54 Dokumen	6.337.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	54 Dokumen	6.887.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	54 Dokumen	5.173.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	54 Dokumen	6.770.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	54 Dokumen	328.479.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	252.980.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	194.623.500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	10.692.500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	10.692.500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	10.692.500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	120.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	470.227.300	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	79.943.767	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	39.900.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12.244.500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	4 Dokumen	42.470.845	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	48.882.805	Badan Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	7.500.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	557.257.938	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Orang	38.137.943	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.530.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	95.343.218.263	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	3.000.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	54.651.500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	89.126.500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	100.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	2 Dokumen	93.070.494	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	5.617.619	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25.746.864	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	417.484.388	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	68.488.602	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	133.285.130	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	85.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	150.067.921	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	50.040.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	110.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03				KEPEGAWAIAN			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.350.389.828	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35 Orang	65.000.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2.529.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	14.775.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	175.000.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	2 Unit	76.000.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	21.700.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	46.366.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	27.000.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18 Unit	6.900.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	3.500.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	177.000.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	65.000.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	13.820.100	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	45.000.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	18.500.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	5 Dokumen	89.568.650	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	75.000.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	55.000.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	56 Orang	26.864.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	15.000.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	206 Orang	27.000.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	6 Orang	15.000.000	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	1.233.050.850	Badan Kepegawaian & Pengemb. SDM
					INSPEKTORAT			
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4.387.395.843	Inspektorat
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38 Orang	14.794.800	Inspektorat
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	32.434.400	Inspektorat
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	2.866.500	Inspektorat
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228 Laporan	130.603.000	Inspektorat
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	1 Unit	1.400.000	Inspektorat
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	3.050.000	Inspektorat
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	52.478.500	Inspektorat
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	5.281.200	Inspektorat
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	4.995.000	Inspektorat
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	37.645.000	Inspektorat
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1 Unit	500.000	Inspektorat
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	8.420.000	Inspektorat
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	7.400.000	Inspektorat
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14 Laporan	190.960.000	Inspektorat
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7 Laporan	118.570.000	Inspektorat
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	43 Laporan	145.375.000	Inspektorat
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	15.800.000	Inspektorat
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	7 Laporan	142.410.000	Inspektorat
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	1 Kesepakatan	260.000	Inspektorat
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	62.735.000	Inspektorat
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	13.750.000	Inspektorat
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	48 Laporan	455.395.000	Inspektorat
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi			
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 perangkat daerah	147.970.000	Inspektorat
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 perangkat daerah	180.000	Inspektorat
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	289.564.000	Inspektorat
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 perangkat daerah	45.654.500	Inspektorat
					KECAMATAN TANETE RIAJA			
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.120.324.828	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	4.598.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2.401.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	1.530.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	30.665.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	4.985.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1.505.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.318.500	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	579 Laporan	174.979.800	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	5 Unit	15.549.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	32.900.700	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	67.782.700	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	25.915.800	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	21.615.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	4 Unit	660.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	5.130.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	7.710.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	14.630.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.565.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	1.160.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakata	2.000.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakata	12.343.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	46.117.400	Kec. Tanete Riaja
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	100.443.670	Kec. Tanete Riaja
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakata	131.258.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	16.300.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	16.650.000	Kec. Tanete Riaja
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	42.150.800	Kec. Tanete Riaja
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	3.528.000	Kec. Tanete Riaja
					KECAMATAN MALLUSETASI			
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	3.704.871.046	Kec. Mallusetasi
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	16.260.000	Kec. Mallusetasi
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Paket	7.497.000	Kec. Mallusetasi
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	8.760.000	Kec. Mallusetasi
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1045 Laporan	200.285.500	Kec. Mallusetasi
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	27.852.400	Kec. Mallusetasi
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	41.792.700	Kec. Mallusetasi
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	60.785.161	Kec. Mallusetasi
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	282.600.000	Kec. Mallusetasi
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	48.220.000	Kec. Mallusetasi
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	8.350.000	Kec. Mallusetasi
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	65.500.000	Kec. Mallusetasi
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	8.850.000	Kec. Mallusetasi
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakata	24.624.000	Kec. Mallusetasi
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	394.358.000	Kec. Mallusetasi
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas / Ormas	103.770.000	Kec. Mallusetasi
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	1.314.000	Kec. Mallusetasi
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakata	225.179.000	Kec. Mallusetasi
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.650.000	Kec. Mallusetasi
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	9.175.000	Kec. Mallusetasi
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	47.826.400	Kec. Mallusetasi
					KECAMATAN SOPPENG RIAJA			
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	2.678.314.358	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	9.196.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	900.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	1.420.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	34.170.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	4.307.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	7.030.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.990.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	945 Laporan	161.895.100	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	2 Unit	8.100.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	22.081.250	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.143.200	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Laporan	23.237.274	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	121.800.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	44.032.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	9.985.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	10.065.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	22.385.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	8.002.500	Kec. Soppeng Riaja
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	2.307.000	Kec. Soppeng Riaja

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakata	1.800.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakata	17.646.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	221.030.628	Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	25.119.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	835.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakata	243.733.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18.840.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	16.665.000	Kec. Soppeng Riaja
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	28 Orang	40.722.800	Kec. Soppeng Riaja
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	3.065.000	Kec. Soppeng Riaja
					KECAMATAN BALUSU			
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	1.850.861.352	Kec. Balusu
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	54.714.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	3.000.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 Paket	3.600.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	25.000.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	8.500.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	3.960.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.650.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	581 Laporan	168.780.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	30 Unit	115.000.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	75.000.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	78.500.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	30.000.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	9.600.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	92.345.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	22 Unit	3.000.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	6.000.000	Kec. Balusu
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	28.000.000	Kec. Balusu
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah & Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	75.800.000	Kec. Balusu
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	3.500.000	Kec. Balusu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakata	20.500.000	Kec. Balusu
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakata	7.500.000	Kec. Balusu
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Unit	110.000.000	Kec. Balusu
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	30.000.000	Kec. Balusu
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	3.000.000	Kec. Balusu
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakata	174.945.500	Kec. Balusu
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	32.500.000	Kec. Balusu
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	16.000.000	Kec. Balusu
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	17.000.000	Kec. Balusu
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	46.500.000	Kec. Balusu
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	5.000.000	Kec. Balusu
					KECAMATAN BARRU			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	4.452.319.191	Kec. Barru
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	13.794.000	Kec. Barru
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	7.120.000	Kec. Barru
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Paket	5.649.000	Kec. Barru
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	59.080.000	Kec. Barru
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	6.791.500	Kec. Barru
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	14.285.000	Kec. Barru
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.631.000	Kec. Barru
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	548 Laporan	146.721.200	Kec. Barru
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	251 Unit	111.054.000	Kec. Barru
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19 Unit	29.394.000	Kec. Barru
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	465.298.000	Kec. Barru
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	39.892.734	Kec. Barru
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	28.865.000	Kec. Barru
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	79.705.000	Kec. Barru
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	6 Unit	3.260.000	Kec. Barru
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	7.810.000	Kec. Barru
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	20.039.487	Kec. Barru
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	1.050.000	Kec. Barru
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	24.670.000	Kec. Barru
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	35.955.500	Kec. Barru
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	923.000	Kec. Barru
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakata	4.565.000	Kec. Barru
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakata	45.925.000	Kec. Barru
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	563.228.657	Kec. Barru

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	47.075.000	Kec. Barru
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	3.065.000	Kec. Barru
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	806.906.000	Kec. Barru
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	21.665.000	Kec. Barru
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan	9.900.000	Kec. Barru
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	2.045.000	Kec. Barru
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	7.315.000	Kec. Barru
					KECAMATAN PUJANANTING			
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	1.873.092.303	Kec. Pujananting
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	18.555.000	Kec. Pujananting
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2.145.000	Kec. Pujananting
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	29.145.000	Kec. Pujananting
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	33.900.000	Kec. Pujananting
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	5.323.500	Kec. Pujananting
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	4.320.000	Kec. Pujananting
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	44.558.800	Kec. Pujananting
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	104.160.000	Kec. Pujananting
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	28 Unit	83.820.000	Kec. Pujananting
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	75.350.000	Kec. Pujananting
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.330.638	Kec. Pujananting
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	19.612.170	Kec. Pujananting
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	84.000.000	Kec. Pujananting
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	30.500.000	Kec. Pujananting

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	4.500.000	Kec. Pujananting
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	10.020.000	Kec. Pujananting
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	20.500.000	Kec. Pujananting
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	200.000.000	Kec. Pujananting
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	164.703.600	Kec. Pujananting
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	46.438.000	Kec. Pujananting
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	16.200.000	Kec. Pujananting
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.650.000	Kec. Pujananting
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32 Orang	36.388.888	Kec. Pujananting
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	22.494.000	Kec. Pujananting
					KECAMATAN TANETE RILAU			
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	3.700.217.319	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Paket	944.500	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8 Paket	1.312.800	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	42.060.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	5.195.253	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1.745.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.372.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	541 Laporan	166.830.500	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	10 Unit	26.300.000	Kec. Tanete Rilau

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	50.668.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	8.125.700	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	113.598.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	29.330.781	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	14.465.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	25.800.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Unit	6.985.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	5.359.200	Kec. Tanete Rilau
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	15.938.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	9.980.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	444.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakata	2.664.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakata	21.250.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	161.228.324	Kec. Tanete Rilau
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	6.950.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	2 Laporan Laporan	2.124.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakata	297.022.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.104.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	19.360.000	Kec. Tanete Rilau
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	69.270.800	Kec. Tanete Rilau
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	4.483.500	Kec. Tanete Rilau

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.197.190.708	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	4.860.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	1.506.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11 Paket	1.697.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78 Laporan	46.101.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1.980.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	46.138.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	9.734.868	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	26.820.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	3.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	5.180.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 Orang	5.828.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	2 Dokumen	1.016.743.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	92050 Orang	607.364.346	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan & Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23 Orang	15.533.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	20.305.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	SKPD PELAKSANA
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	27.140.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	13 Orang	28.215.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	23.533.158	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59 Orang	115.245.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	18.529.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	149.957.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Pegawai	449.608.603.919,00
2	Belanja Barang-Jasa	304.553.511.074,00
3	Belanja Bunga	2.530.000.000,00
4	Belanja Subsidi	0,00
5	Belanja Hibah	10.744.988.580,00
6	Belanja Bantuan Sosial	0,00
7	Belanja Modal	98.871.835.953,00
8	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00
9	Belanja Bagi Hasil	0,00
10	Belanja Bantuan Keuangan	95.910.003.289,00
	TOTAL	965.218.942.816,00

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp.449.465.697.919,- untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp.10.744.988.580,00 kepada lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan dan Partai Politik. Adapun belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp.403.425.347.028,- berupa belanja barang jasa dan belanja modal.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

Rincian Palfon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(
	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.887.376.715,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	8.887.376.715,00
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	8.887.376.715,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.053.031.265,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.053.031.264,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.053.031.265,00
	Pembiayaan Netto	3.834.345.450,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2024

BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Barru telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Barru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru dan menjadi Pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Barru, 11 Juli 2024



BUPATI BARRU

SUARDI SALEH